

## ANALISIS PENERAPAN MODEL EKONOMI “*EKSPOR BASE*” DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Ary Sutrichastini**

STIE Widya Wiwaha Yogyakarta  
email: ary\_sch@yahoo.co.id

**Suci Utami Wikaningtyas**

STIE Widya Wiwaha Yogyakarta  
email: suciwikan@yahoo.co.id

### **Abstract**

*This study are reveal to know what sectors of economy are relatively potential and have a role to be base sector for support development of DIY, how big the multiplier effect of the base sector activities for regional income of DIY, and how big regional income divulgence that happen as a consequences of base sector activities. The secondary data are used for this study under range of 2001-2005. They take from BPS. LQ (location quotient) method is used as analysis method. The result show that agriculture, electricity, gas and fresh water, property, hotel and restaurant, accommodation and communication, and services sectors are base sectors. Services sector have highest potential. The highest value of LQ improve that evidence. The mean of multiplier effect is 1.335 that is mean if bases sectors increase one percent will cause non bases sectors to increase 0.335%. The mean of regional income divulgence is 1.610% that is mean if DIY has 98.39% income. From this study, researchers hope can give more information for better policy of the government made.*

*Keywords: Location quotient, Base sector, Non base sector, Multiplier effect*

### **PENDAHULUAN**

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun bukan suatu indikator yang bagus, tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari aspek ekonominya dapat diukur

dengan pendapatan nasional per kapita. Untuk meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi salah satu target pembangunan yang harus dicapai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan suatu negara.

Oleh karena itu, tidak heran jika pada awal pembangunan ekonomi, umumnya di banyak negara perencanaan pembangunan ekonomi lebih berorientasi pada pertumbuhan.

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir-akhir ini menunjukkan bahwa keadaan perekonomian semakin membaik. Hal ini terbukti dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 dibandingkan tahun 2004. Berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 sebesar 5,60 persen dan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 6,48 persen. Nilai Produk domestik Bruto atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2004 adalah 1.656,8 triliun rupiah dan tanpa migas adalah 1.506,6 triliun rupiah, pada tahun 2005 meningkat menjadi 1.749,5 triliun rupiah sementara tanpa migas menjadi 1.604,2 triliun rupiah (BPS, 2005).

Pada tahun 2002 peranan sektor pertanian sekitar 15,46 persen, kemudian berangsur-angsur turun menjadi 15,19 persen di tahun 2003 dan 13,40 persen pada tahun 2005. Kontribusi terbesar sektor pertanian diberikan oleh subsektor tanaman bahan makanan, utamanya padi yang menjadi bahan makanan pokok rakyat Indonesia.

Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi atau setengah jadi baik domestic maupun internasional, telah mendorong peranan sector industri pengolahan menjadi peringkat pertama dalam pembentukan PDB sejak tahun 1991. Pada tahun 2002 peranan sektor industri mencapai 28,72 persen menurun menjadi 28,25 persen di tahun 2003 dan 28,13 persen di tahun 2004. Kemudian di tahun 2005 kembali menurun menjadi sebesar 28,06 persen. Pembentukan PDB

sektor industri pengolahan didominasi oleh subsektor industri bukan migas, khususnya industri alat angkutan, mesin dan peralatannya.

Sumbangan sektor ekonomi tanpa migas terhadap PDB pada tahun 2002 adalah 91,06 persen, kemudian meningkat peranannya pada tahun 2003 menjadi 91,42 persen dan kembali menurun pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing 91,15 persen dan 88,93 persen. Secara keseluruhan, struktur perekonomian Indonesia selama periode 2002-2005 dapat dilihat pada tabel 1.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengemukakan kewenangan daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerahnya semakin luas. Konsekuensi dari kewenangan tersebut adalah adanya tuntutan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun program dan rencana daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Selain itu juga membawa konsekuensi berkurangnya sumber penerimaan dominan masing-masing pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

Menurut Arsyad (2004), masalah pokok yang sering dihadapi dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha

Tabel 1  
Peranan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2005 (Persen)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	15,46	15,19	14,59	13,41
2. Pertambangan & Penggalian	8,83	8,33	8,63	10,44
3. Industri Pengolahan	28,72	28,25	28,13	28,06
4. Listrik	0,84	0,94	0,97	0,92
5. Konstruksi	6,07	6,22	6,29	6,35
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	17,14	16,64	16,27	15,75
7. Pengangkutan & Komunikasi	5,38	5,91	6,25	6,63
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	8,48	8,64	8,55	8,35
9. Jasa-jasa	9,09	9,87	10,32	10,10
Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00
PDB tanpa migas	91,07	91,42	91,15	88,93

Sumber : Statistik Indonesia, BPS, 2006

meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, maka harus benar-benar diperhatikan sektor mana yang menjadi basis sehingga dapat menyumbang terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Soepono (2001) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional berbasis ekspor menerangkan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah adalah *basic* dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah tersebut, sedangkan aktivitas-aktivitas lain atau disebut *non basic* merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut. Sedangkan teori basis ekonomi tertanam dalam gagasan bahwa perekonomian lokal harus menambah aliran uang masuk agar tumbuh dan satu-satunya cara yang efektif untuk

menambah aliran uang masuk adalah menambah ekspor.

Tabel 2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005 di DIY (dalam %)

Sektor/sub sector	Tahun 2005
1. Pertanian	4,35 %
2. Pertambangan dan penggalian	1,57 %
3. Industri pengolahan	2,60 %
4. Listrik, gas & air bersih	5,83 %
5. Bangunan	8,61 %
6. Perdagangan, hotel & restoran	5,04 %
7. Pengangkutan & komunikasi	5,76 %
8. Keuangan, Persewaan & jasa perusahaan	8,17 %
9. Jasa-jasa	2,49 %

Sumber : BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005

Berdasarkan BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2005), pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2005 sekitar 4,71 persen. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2005 masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2004 sebesar 5,12 persen.

Hal yang menggembirakan dari gambaran ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 adalah pertumbuhan positif dari seluruh sektor. Sektor bangunan mengalami pertumbuhan paling besar yaitu sebesar 8,61 persen. Disusul dengan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi masing-masing sebesar 8,17 persen, 5,83 persen dan 5,76 persen. Sedangkan sektor pertanian pada tahun ini mampu tumbuh positif sebesar 4,35 persen.

Pada tabel 2 terlihat bahwa semua sektor mengalami peningkatan, tetapi secara keseluruhan peningkatan tersebut belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang relatif berpotensi dan berperan menjadi sektor basis untuk menunjang pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Berapa besar multiplier dari kegiatan sektor basis terhadap pendapatan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Berapa besarnya kebocoran pendapatan daerah yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan sektor basis

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis sektor-sektor yang relatif berpotensi dan dapat berperan menjadi sektor basis guna menunjang pembangunan di daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk menganalisis berapa besar multiplier dari kegiatan sektor basis tersebut terhadap pendapatan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Untuk menganalisis besarnya kebocoran pendapatan daerah yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan sektor basis di Daerah Istimewa Yogyakarta

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Pengertian Pendapatan Nasional**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDB) baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

## 2. Pengertian PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

## 3. Kegunaan Data PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain dapat disebutkan berikut ini:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah.

Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian. suatu daerah.

4. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan .kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.

## 4. Teori *Export Base*

Teori ini mengatakan bahwa sektor ekspor berperan penting dalam pembangunan daerah, karena sektor tersebut dapat memberikan kontribusi penting kepada perekonomian daerah yaitu (Arsyad, 2004):

1. Ekspor akan secara langsung meningkatkan pendapatan faktor-faktor produksi dan pendapatan daerah
2. Perkembangan ekspor akan menciptakan permintaan terhadap produksi industri lokal yaitu industri yang produknya dipakai untuk melayani pasar di daerah

*Export base theory* pada dasarnya aktivitas ekonomi dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu

1. Kegiatan ekonomi yang melayani pasar luar daerah yang bersangkutan disebut sektor basic
2. Kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri dinamakan non basic.

Pada dasarnya penggunaan model *export base* berasal dari formula yang dikemukakan oleh Keynesian (Juleff, 1993)

$$Y_t = E_t + X_t - M_t$$

$Y_t$  adalah pendapatan daerah pada waktu tahun ke  $t$ ,  $E_t$  menunjukkan pengeluaran domestik,  $X_t$  menunjukkan ekspor dan  $M_t$  menunjukkan impor.

$$E_t = e_t Y_t$$

$$M_t = m_t Y_t$$

Rumus di atas merupakan pertumbuhan ekonomi dan produk regional sebagai interaksi antara faktor penawaran dan faktor permintaan. Menurut model basis ekonomi, pertumbuhan suatu daerah tergantung pada pertumbuhan ekspornya dan kenaikan permintaan yang bersifat ekstern bagi daerah yang bersangkutan merupakan penentu pokok dari pertumbuhan regional. Bertambah luasnya basis ekspor akan cenderung menaikkan tingkat pertumbuhan. Sebagai akibatnya daerah-daerah yang tumbuh paling cepat akan cenderung mengalami surplus ekspor. Jika daerah-daerah mempunyai kelebihan kapasitas maka perluasan basis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Model basis ekonomi agak berbeda dengan model tipe Keynes. Yang dijelaskan dalam model basis ekonomi adalah perubahan pendapatan regional. Fungsi tabungan dalam menciptakan kebocoran dianggap sebagai impor, yang merupakan fungsi dari pendapatan. Sedangkan fungsi investasi diasumsikan sebagai ekspor yang merupakan pendorong dari perekonomian yang berbasis ekonomi (ekspor).

Model basis ekspor atau basis ekonomi memiliki kelebihan tetapi masih ada beberapa kritik untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang salah tentang studi-studi lain dan untuk memahami batas-

batas pendekatan ini. Kritik-kritik terhadap teori basis antara lain :

#### 1. Keutamaan ekspor

Teori basis ekonomi menekankan ekspor sebagai satu-satunya penentu pertumbuhan ekonomi padahal penentu pertumbuhan banyak seperti peningkatan investasi dari luar daerah atau dengan mengganti produk-produk dan jasa-jasa yang semula diimpor dengan produksi dalam negeri.

#### 2. Substitusi impor

Substitusi impor merupakan suatu alternative strategi pembangunan yang masyarakat gunakan untuk mendorong pertumbuhan tanpa menambah ekspor. Dari pada menambah ekspor, lebih baik menghasilkan di daerah setempat apa yang semula diimpor. Strategi demikian akan mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang lebih kecil tiap rupiah yang masuk ke dalam aliran uang berputar akan menciptakan pendapatan lebih banyak.

#### 3. Produktivitas

Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan sumber daya lain juga dapat menaikkan tingkat pendapatan tanpa meningkatkan tingkat ekspor. Kenaikkan produktivitas dapat pula menambah ekspor bila perbaikan produktivitas itu berada di sektor ekspor.

Walaupun ada beberapa kritik terhadap pertumbuhan ekonomi model basis ekspor, tetapi model ini tetap salah satu teori prinsipil yang melandasi kebijakan dalam pembangunan dan perencanaan perkotaan (Soepono, 2001)

#### 5. Teknik Menentukan dan Mengukur Suatu Basis

LQ (*Location Quotient*) merupakan suatu teknik yang digunakan untuk

menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat *self-sufficiency* suatu sektor.

Dasar pemikiran teknik ini adalah : karena sektor basic menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor basic, tetapi juga menaikkan permintaan akan sektor non basic. Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor non basic merupakan investasi yang didorong sebagai akibat dari kenaikan industri basic. Oleh karena itu, sektor basic-lah yang patut dikembangkan di suatu daerah. Tugas pertama yang harus dilakukan yaitu dengan menentukan atau menggolongkan kegiatan yang termasuk sektor basic dan yang non basic dengan menggunakan LQ.

LQ dirumuskan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{E_{ij} / E_j}{E_{in} / E_n}$$

Keterangan :

$E_{ij}$  = variabel regional disektor i di wilayah j

$E_j$  = variabel regional di wilayah j

$E_{in}$  = variabel regional di sektor i di perekonomian nasional

$E_n$  = variabel regional di perekonomian regional

Dengan menggunakan asumsi bahwa perekonomian yang *self-sufficient*, maka LQ lebih besar satu berarti bahwa

perekonomian daerah memiliki kesempatan kerja lebih dari cukup di sektor i untuk menyediakan daerah itu dengan produknya, dengan kata lain sektor i merupakan sektor basic. Bila bagi hasil lokasi itu kurang dari satu, berarti daerah itu kekurangan produk yang dihasilkan oleh sektor i dan harus mendatangkan atau mengimpor produk itu bila konsumsi di daerah itu ingin dipertahankan. Jika kondisinya demikian maka sektor i adalah sektor non basic.

## METODE PENELITIAN

### 1. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan obyek penelitian adalah PDRB secara sektoral di propinsi DIY tahun 2003-2006. Dalam penelitian ini dilihat juga PDB Indonesia digunakan sebagai daerah referensi dan selanjutnya dapat dianalisis sektor-sektor yang patut dikembangkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi rentang pengamatan dari tahun 2003-2006. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik DIY dan Badan Pusat Statistik Indonesia yang diterbitkan oleh BPS.

### 3. Variabel Penelitian

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi DIY berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000 dari tahun 2003-2006 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah.
2. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan 2000 dari tahun 2003-2006 yang dinyatakan dalam milyar rupiah.

#### 4. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. PDB pada tingkat nasional atau PDRB pada tingkat regional adalah menggambarkan kemampuan wilayah untuk menciptakan output atau nilai tambah pada suatu waktu tertentu
2. Perhitungan PDB dan PDRB dalam penelitian ini menggunakan pendekatan produksi. Dalam pendekatan produksi ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh masing-masing sektor produktif yang ada dalam perekonomian
3. Klasifikasi sektor dalam penyajian PDB dan PDRB dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sector ekonomi yang mencakup Pertanian dan penggalian; industri pengolahan; Listrik, bangunan dan air bersih; Perdagangan, hotel dan restoran; transportasi dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa
4. Penggunaan PDB dan PDRB atas dasar harga konstan dilakukan dengan alasan supaya dapat memberikan gambaran tentang produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah

#### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat eksploratif. Dalam menganalisis sektor basis digunakan metode LQ ( Location Quotient) sebagai berikut (Soepono, 2001)

$$\frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n} = LQ$$

*Keterangan :*

LQ = Koefisien Location Quotient

$E_{ij}$  = Variabel regional disektor i di wilayah j

$E_j$  = Variabel regional di wilayah j

$E_{in}$  = Variabel regional di sektor i di wilayah nasional

$E_n$  = Variabel regional di perekonomian nasional

Apabila LQ = 1, berarti semua permintaan akan output suatu sektor dipenuhi oleh sektor tersebut di daerah maupun di daerah himpunan. Apabila LQ > 1, berarti sektor i mampu melakukan ekspor sehingga disebut sektor *basic*. Apabila LQ < 1, berarti daerah tersebut kekurangan produk yang dihasilkan oleh sektor i dan harus mendatangkan atau mengimpor produk itu apabila pola konsumsi di daerah itu ingin dipertahankan, maka sektor ini disebut sektor *non basic*.

Untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu menghitung nilai *multiplier* dapat dipergunakan perhitungan *multiplier export base*, dengan rumus :

$$\frac{1}{1-a} = K$$

Dimana a = S/T

*Keterangan :*

K = Multiplier

a = Nilai perbandingan antara kegiatan sektor non basis dengan kegiatan ekonomi total

S = Sektor non basis

T = Sektor ekonomi total

Sedangkan menjawab permasalahan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kebocoran pendapatan daerah yang terjadi sebagai akibat dari sektor basis, digunakan rumus (Arsyad, 1999)

$$L = 100 - ((1 - LQ / 100))$$

**Keterangan :**

L = Besarnya kebocoran  
 LQ = Koefisien Location Quotient  
 100 = Konstanta

**ANALISIS DATA****1. Analisis Menentukan Sektor Basis**

Peranan setiap sektor dapat diketahui dari kontribusi yang diberikan terhadap perekonomian daerah. Untuk mengetahui suatu sektor termasuk basis atau bukan dapat diketahui dengan menghitung *Location Quotient*. Suatu sektor dikatakan sebagai sektor basis

apabila sektor tersebut mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu. Dari perhitungan diperoleh hasil bahwa secara rata-rata di Daerah Istimewa Yogyakarta dari periode 2001 – 2005 ada 4 sektor yang termasuk basis yaitu sektor pertanian; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor jasa-jasa. Besarnya nilai LQ masing-masing adalah 1,715, 1,213, 1,173 dan 1,993.

Bila dilihat per kabupaten, di Kulon Progo yang termasuk sektor basis adalah sektor pertanian dengan nilai LQ 1,903; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,970; dan sektor jasa-jasa sebesar 2,095. Kabupaten Bantul terdapat

Tabel 3  
 Rata-rata *Location Quotient* Tiap-tiap Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
 Periode 2001 – 2005

No	Sektor	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta	Rata-rata DIY
1	Pertanian	1,903	1,499	2,537	1,069	0,045	1,411
2	Pertambangan & Penggalian	0,096	0,113	0,196	0,041	0,001	0,089
3	Industri Pengolahan	0,410	0,608	0,425	0,595	0,424	0,493
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,917	1,034	0,576	1,266	2,075	1,174
5	Bangunan	0,936	1,645	1,318	1,713	1,121	1,347
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	0,973	1,091	0,782	1,230	1,441	1,103
7	Pengangkutan & Komunikasi	1,970	1,403	1,479	1,434	3,170	1,891
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,730	0,725	0,486	1,214	1,698	0,971
9	Jasa-jasa	2,095	1,859	1,594	1,916	2,568	2,006

Sumber : Data diolah

empat sektor basis yaitu sektor pertanian; sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor jasa-jasa. Nilai LQ yang tertinggi dari keempat sektor tersebut adalah sektor jasa-jasa. Di Kabupaten Gunung Kidul terdapat tiga sektor yang bukan basis yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan di Kabupaten Sleman dan Yogyakarta mempunyai empat sektor basis yang sama yaitu sektor pertanian; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

atau peningkatan kegiatan ekonomi sektor non basis rata-rata sebesar 0,397. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, perkembangan multiplier cenderung meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan kegiatan ekonomi sektor basis memberikan dampak ekonomi di sector non basis semakin tinggi. Besarnya *Multiplier*, Perubahan Kegiatan Sektor Basis dan Perubahan Sektor Non Basis Kabupaten Kulon Progo, Periode 2001 – 2005 ditampilkan pada tabel 4.

Pada periode 2001-2005 di Kabupaten Bantul, perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi sektor basis

Tabel 4  
Besarnya Multiplier, Perubahan Kegiatan Sektor Basis dan Perubahan Sektor Non Basis Kabupaten Kulon Progo, Periode 2001 – 2005

Tahun	Multiplier	$\Delta$ Sektor Basis	$\Delta$ Sektor Non Basis
2001	1,402	1	0,402
2002	1,414	1	0,414
2003	1,389	1	0,389
2004	1,794	1	0,794
2005	1,803	1	0,803
Rata-rata	1,397	1	0,397

Sumber : Data diolah

## 2. Analisis Menentukan Multiplier

Dilakukannya perhitungan multiplier dari kegiatan sektor basis adalah untuk menganalisis seberapa besar perubahan atau peningkatan kegiatan sektor basis, sektor non basis maupun perubahan terhadap sektor ekonomi total di setiap kabupaten/ kota Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2001-2005.

Pada periode 2001-2005 di Kabupaten Kulon Progo, perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi sektor basis sebesar 1 (satu) menyebabkan perubahan

sebesar 1 (satu) menyebabkan perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi sektor non basis rata-rata sebesar 0,334. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, perkembangan *multiplier* fluktuatif, namun ada kecenderungan meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan kegiatan ekonomi sektor basis memberikan dampak ekonomi di sektor non basis semakin tinggi. Besarnya Multiplier, Perubahan Kegiatan Sektor Basis dan Perubahan Sektor Non Basis Kabupaten Bantul, Periode 2001 – 2005 ditampilkan pada tabel 5.

Tabel 5  
Besarnya Multiplier, Perubahan Kegiatan Sektor Basis dan Perubahan Sektor Non Basis Kabupaten Bantul, Periode 2001 – 2005

Tahun	Multiplier	$\Delta$ Sektor Basis	$\Delta$ Sektor Non Basis
2001	1,301	1	0,301
2002	1,304	1	0,304
2003	1,314	1	0,314
2004	1,377	1	0,377
2005	1,375	1	0,375
Rata-rata	1,334	1	0,334

Sumber : Data diolah.

Pada periode 2001-2005 di Kabupaten Gunung Kidul, perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi sektor basis sebesar 1 (satu) menyebabkan perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi sektor non basis rata-rata sebesar 0,460. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, perkembangan multiplier fluktuatif, namun ada kecenderungan meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan kegiatan ekonomi sektor basis memberikan dampak ekonomi di sektor non basis semakin tinggi. Besarnya *Multiplier*, Perubahan Kegiatan Sektor Basis dan Perubahan Sektor Non

Basis Kabupaten Gunung Kidul, Periode 2001 – 2005 ditampilkan pada tabel 6.

Pada periode 2001-2005 di Kabupaten Sleman, perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi sektor basis sebesar 1 (satu) menyebabkan perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi sektor non basis rata-rata sebesar 0,338. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, perkembangan multiplier fluktuatif, namun ada kecenderungan menurun. Dengan demikian dapat dikatakan kegiatan ekonomi sektor basis memberikan dampak ekonomi di

Tabel 6  
Besarnya Multiplier, Perubahan Kegiatan Sektor Basis dan Perubahan Sektor Non Basis Kabupaten Gunung Kidul, Periode 2001 – 2005

Tahun	Multiplier	$\Delta$ Sektor Basis	$\Delta$ Sektor Non Basis
2001	1,409	1	0,409
2002	1,426	1	0,426
2003	1,484	1	0,484
2004	1,494	1	0,494
2005	1,487	1	0,487
Rata-rata	1,460	1	0,460

Sumber : Data diolah.

sektor non basis semakin rendah. Besarnya Multiplier, Perubahan Kegiatan Sektor Basis dan Perubahan Sektor Non Basis Kabupaten Sleman, Periode 2001 – 2005 ditampilkan pada tabel 7.

dari tahun ke tahun, perkembangan multiplier fluktuatif, namun ada kecenderungan menurun. Dengan demikian dapat dikatakan kegiatan ekonomi sektor basis memberikan dampak ekonomi di

Tabel 7  
Besarnya Multiplier, Perubahan Kegiatan Sektor Basis dan Perubahan Sektor Non Basis Kabupaten Sleman, Periode 2001 – 2005

Tahun	Multiplier	$\Delta$ Sektor Basis	$\Delta$ Sektor Non Basis
2001	1,446	1	0,446
2002	1,451	1	0,451
2003	1,206	1	0,206
2004	1,295	1	0,295
2005	1,292	1	0,292
Rata-rata	1,338	1	0,338

Sumber : Data diolah.

Pada periode 2001-2005 di Kota Yogyakarta, perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi sektor basis sebesar 1 (satu) menyebabkan perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi sektor non basis rata-rata sebesar 0,144. Apabila dilihat

sektor non basis semakin rendah. Besarnya Multiplier, Perubahan Kegiatan Sektor Basis dan Perubahan Sektor Non Basis Kota Yogyakarta, Periode 2001– 2005 ditampilkan pada tabel 8.

Tabel 8  
Besarnya Multiplier, Perubahan Kegiatan Sektor Basis dan Perubahan Sektor Non Basis Kota Yogyakarta, Periode 2001 – 2005

Tahun	Multiplier	$\Delta$ Sektor Basis	$\Delta$ Sektor Non Basis
2001	1,141	1	0,141
2002	1,141	1	0,141
2003	1,152	1	0,152
2004	1,145	1	0,145
2005	1,140	1	0,140
Rata-rata	1,144	1	0,144

Sumber : Data diolah.

### 3. Analisis Menentukan Kebocoran Daerah Sebagai Akibat Dari Sektor Basis

Dengan dilakukannya perhitungan terhadap kebocoran pendapatan daerah, maka akan dapat diketahui besarnya pendapatan sektor yang masih berada di kabupaten/ kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Besarnya tingkat kebocoran menunjukkan bahwa selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri produk yang dihasilkan juga mampu di ekspor ke daerah lain.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kebocoran pendapatan yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2001 – 2005 adalah sektor

jasa-jasa. Hal ini terbukti bahwa sejak tahun 2001 – 2005 sektor ini mampu menempati urutan tertinggi dibanding dengan sektor-sektor yang lain.

### KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan metode LQ (*Location Quotient*) dapat diketahui sektor-sektor yang termasuk sektor basis di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2001-2005 adalah : sektor pertanian; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor jasa-jasa. Hal ini dibuktikan

Tabel 9  
Persentase Rata-rata Kebocoran dan Pendapatan yang Tetap Berada di setiap Kabupaten/ Kota Periode 2001 – 2005

No	Sektor	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta	RK DIY	P DIY
1	Pertanian	1,903	1,499	2,537	1,069	-	1,752	98,248
2	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-
4	Listrik, Gas & Air Bersih	-	1,034	-	1,266	2,075	1,458	98,542
5	Bangunan	-	1,645	1,318	1,713	1,121	1,449	98,551
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	-	1,091	-	1,230	1,441	1,254	98,746
7	Pengangkutan & Komunikasi	1,970	1,403	1,479	1,434	3,170	1,891	98,109
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-	-	-	1,214	1,698	1,456	98,544
9	Jasa-jasa	2,095	1,859	1,594	1,916	2,568	2,006	97,994

Sumber : Data diolah

Keterangan :

RK DIY adalah rata-rata kebocoran DIY

P DIY adalah rata-rata persentase pendapatan yang tetap berada di DIY

dengan nilai LQ masing-masing adalah 1,715; 1,213; 1,173 dan 1,993.

2. Bila dilihat per kabupaten, di Kulon Progo yang termasuk sektor basis adalah sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Kabupaten Bantul terdapat empat sektor basis yaitu sektor pertanian; sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor jasa-jasa. Kabupaten Gunung Kidul terdapat tiga sektor yang bukan basis yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan di Kabupaten Sleman dan Yogyakarta mempunyai empat sektor basis yang sama yaitu sektor pertanian; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor pengangkutan dan komunikasi
3. Pada periode 2001-2005 di Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan kegiatan ekonomi sektor basis memberikan dampak ekonomi di sektor non basis semakin tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan multiplier cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan nilai multiplier sebesar 1,397.

Kabupaten Bantul, dapat dikatakan kegiatan ekonomi sektor basis memberikan dampak ekonomi di sektor non basis semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan multiplier fluktuatif, namun ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan nilai multiplier adalah 1,334.

Kabupaten Gunung Kidul dapat dikatakan kegiatan ekonomi sektor basis memberikan dampak ekonomi di sektor

non basis semakin tinggi. Hal ini dibuktikan perkembangan multiplier fluktuatif, namun ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya nilai multiplier 1,460.

Kabupaten Sleman dapat dikatakan kegiatan ekonomi sektor basis memberikan dampak ekonomi di sektor non basis semakin rendah. Hal ini dibuktikan perkembangan multiplier fluktuatif, namun ada kecenderungan menurun. Sedangkan nilai multiplier adalah 1,338.

Kota Yogyakarta dapat dikatakan kegiatan ekonomi sektor basis memberikan dampak ekonomi di sektor non basis semakin rendah. Hal ini dapat dibuktikan perkembangan multiplier fluktuatif, namun ada kecenderungan menurun. Dengan nilai multiplier sebesar 1,144.

4. Dilihat dari tingkat kebocoran pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2001 – 2005 sektor jasa-jasa mampu menempati urutan tertinggi dibanding dengan sektor-sektor yang lain yaitu 2,006 persen, berarti 97,994 % dari kebocoran pendapatan sektor ini tetap berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan secara rata-rata bila dilihat per kabupaten adalah untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar 1,989 %, Kabupaten Bantul sebesar 1,422%, Kabupaten Gunung Kidul 1,732 , Kabupaten Sleman sebesar 1,406 % dan Kota Yogyakarta sebesar 2,012%

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini untuk

pengembangan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sektor yang telah diketahui memiliki keunggulan atau sebagai sektor basis hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga terus bersaing dengan sektor yang sama di Indonesia pada tahun yang akan datang.
2. Pemerintah sebaiknya memperhatikan lebih intensif pada sektor-sektor basis yang memiliki nilai LQ cenderung menurun dan bahkan berubah menjadi sektor non basis.
3. Sektor basis hendaknya menjadi pendorong sektor non basis, hal ini dikarenakan apabila perubahan atau peningkatan sektor basis berpengaruh positif terhadap sektor non basis, maka bisa dimungkinkan sektor yang semula non basis menjadi sektor basis.
4. Sektor yang mempunyai kebocoran pendapatan tertinggi harus dipertahankan dan ditingkatkan karena semakin tinggi tingkat kebocoran pendapatan semakin besar pula kemampuan ekspornya. Akan tetapi hal ini tidak boleh mengabaikan pendapatan yang tetap berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pendapatan ini mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri.

Anonim, 2005, *DIY dalam Angka Tahun 2005*, Yogyakarta : BPS

Murti, Bambang K., 2006, Analisis Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta : Pendekatan Teori Pusat Pertumbuhan, *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. I, No. 1, Yogyakarta

Soepono, Prasetyo, 2001, Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (ekspor): Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (Jebi)*, Vol. 16, No. 1, Yogyakarta : FE UGM

Jhingan, ML, 1993, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Juleff, Linda, 1993, The Implication of Export Base Theory for The Study of Advanced Producer Services (1) : Location Quotient Analysis, <http://all.Repec.org/RePEc/wuk/napier/sswpg.PDF>

Tambunan, T, 2005. *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris*, Jakarta : Salemba Empat

#### DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE UGM

Arsyad, Lincoln, 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : STIE YKPN